

HASIL PENELITIAN**DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN SEPANJANG PANTAI  
UJONG BLANG LHOKSEUMAWE TERHADAP PEMUNDURAN  
GARIS PANTAI**

Ishaq Rizal

Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Lhokseumawe,  
Banda Aceh, Sumatera Utara

**Abstract.** Tourism development of Ujong Blang Lhokseumawe beach gives negative impact to physical beach, such as abrasion and the changes of shore-area and shoreline. The samples of this study were assigned by purposive sampling. The data were analysed by using comparative method and overlay map of the land-use area of Ujong Blang beach. The result shows the tourism development of Ujong Blang Lhokseumawe beach gives negative impact on the shift of shore-area functions as protection area to economic activity area. The consequence of the changes is the fasten of abrasion process that was marked by the decreasing of shore-line, in which the shore-line more closer to landward area than before.

**Keywords:** Land, Shore-area, Shore-line.

**PENDAHULUAN**

Pantai dengan segala daya tariknya, menjadikan motor penggerak bagi wisata alam, khususnya yang berbasis pada potensi wisata pantai. Pemanfaatan pantai sebagai tempat bagi pengembangan pariwisata dan industri pariwisata tentu saja berakibat pada makin beratnya beban yang harus didukung oleh lingkungan. Sebagai akibatnya, kualitas lingkungan pantai menjadi menurun seperti adanya degradasi sumberdaya alam pantai dan semakin sempitnya (pemunduran) garis pantai yang dapat dimanfaatkan akibat banyaknya komponen buatan yang tumbuh di sekitarnya.

Pada umumnya pengembangan kepariwisataan masih mengesampingkan aspek-aspek lingkungan, baik lingkungan *biotik*, *abiotik* maupun lingkungan *culture*. Salah satu kasus penting adalah untuk pengembangan dan pembangunan kawasan pantai menjadi kawasan pariwisata. Pantai

dihuni dan dimiliki oleh rakyat kecil yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan, sedangkan pengembangan kepariwisataan berskala besar biasanya dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta yang kadang kala mengabaikan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pengembangan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan. Salah satu permasalahan yang sangat menonjol yang diperkirakan akan timbul adalah degradasi area sempadan pantai dan pemunduran garis pantai akibat perubahan penggunaan lahan pantai.

Sebelum tahun 1970-an pantai Ujong Blang Lhokseumawe hanya sebagai pantai tempat berlabuhnya para nelayan dan untuk mencari ikan di sekitar pantai. Memasuki awal tahun 1990 pantai Ujong Blang makin dikembangkan, ditandai dengan dibangunnya infrastruktur dan sarana penunjang pariwisata di sekitar pantai serta

semakin banyaknya gubuk-gubuk darurat maupun rumah-rumah penduduk yang dibangun di sepanjang pantai. Saat ini pantai Ujong Blang merupakan kawasan objek wisata yang mempunyai pengunjung (wisatawan) terbanyak dalam Kabupaten Aceh Utara, terutama wisatawan domestik. Akibat semakin berkembangnya kepariwisataan tersebut, maka pantai Ujong Blang telah mengalami degradasi lingkungan hidup, baik abiotik (abrasi, berubahnya garis dan sempadan pantai), biotik maupun sosial, ekonomi dan kesehatan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “Dampak perubahan penggunaan lahan sempadan pantai terhadap perubahan garis pantai akibat pengembangan akomodasi dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di sepanjang pantai”. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, antara lain: Sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, terutama dalam pengembangan dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, khususnya pariwisata pantai; Memberi gambaran pengaruh terhadap perubahan fisik pantai, sebagai akibat adanya kegiatan kepariwisataan pantai; Memberi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/pihak-pihak terkait sebagai solusi dan alternatif terbaik untuk menghindari atau menanggulangi dampak-dampak lingkungan yang akan timbul di waktu mendatang di sekitar pantai Ujong Blang khususnya dan wilayah pesisir pada umumnya.

Perkembangan pariwisata selama ini dijalankan cenderung lebih memperhatikan aspek ekonomi saja, pada hal di samping aspek ekonomi, masih ada aspek lain yang peranannya lebih penting dalam perkembangan pariwisata, antara lain aspek lingkungan fisik. Oleh karena itu pengembangan pariwisata harus berwawasan lingkungan, sesuai dengan ciri pembangunan berkelanjutan, yaitu: Fungsi ekosistem

sumberdaya alam tetap berjalan sebagai mana mestinya; Terkendalinya dampak negatif dan berkembangannya dampak positif bagi lingkungan; Kualitas dan kuantitas sumberdaya alam tetap terjaga, dan; Perubahan lingkungan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang (Emil Salim *dalam* Suwandi M. 2001)

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara, melalui Surat Keputusan nomor 0001 tahun 1998 tentang Penetapan Objek Wisata Daerah, maka kawasan wisata pantai Ujong Blang Lhokseumawe menjadi salah satu Objek Wisata Daerah yang meliputi 3 desa, yakni: Desa Hagu Barat laut; Desa Ulee Jalan, dan; Desa Ujong Blang. Di samping itu Bupati Aceh Utara juga telah menetapkan Surat Keputusan nomor 556/035/1998 tentang Pelimpahan wewenang pengelolaan objek wisata daerah. Pengelola objek wisata daerah berkewajiban antara lain, mencegah dan melarang kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penjualan/meminum minuman keras, penggunaan obat-obat terlarang dan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat setempat; memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan mencegah adanya kerusakan/ pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh Utara (Peraturan Bupati Aceh Utara tahun 1998).

Pasal 1 butir (7) Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa salah satu kawasan lindung adalah sempadan pantai. Hal ini sesuai pula dengan pasal 13 dan 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dinyatakan bahwa: “*Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk*

*melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan dan fungsi pantai*”, dan “*Kriteria sempadan pantai adalah dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat*”. Sementara itu pada penjelasan dari kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa sempadan pantai berfungsi sebagai kawasan lindung setempat dan tidak boleh terlalu banyak menerima usikan.

Jika dilihat dari sumber (asal) kejadiannya, jenis-jenis kerusakan lingkungan pesisir ada yang berasal dari luar wilayah pesisir dan ada yang berlangsung di dalam wilayah pesisir itu sendiri. Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan pembangunan (tambak, perhotelan, permukiman, dan industri) yang terdapat di dalam wilayah pesisir; dan juga berupa kiriman dari berbagai kegiatan pembangunan di daerah lahan atas, seperti akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan, kemudian terangkut aliran sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir. Sementara itu, kerusakan lingkungan berupa degradasi fisik, habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun); eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya pesisir; abrasi pantai; konversi kawasan lindung; dan bencana alam (Dahuri, R, dkk, 1996).

Selanjutnya, Sunarto (1992) menyebutkan bahwa proses litoral adalah proses yang terjadi dari interaksi antara angin, gelombang, arus, pasang surut, sedimen, dan gejala-gejala lainnya pada mintakat (zone) litoral. Ada dua proses penting yang merupakan bagian dari proses litoral, yakni akresi dan erosi pantai. Akresi pantai dapat terjadi secara alamiah ataupun artifisial. Akresi alamiah adalah penambahan lahan hanya oleh kerja gaya alamiah pada gisik karena pengendapan material dari air

ataupun udara. Sedangkan akresi artifisial ialah penambahan lahan karena kerja manusia, seperti halnya akresi karena *groin*, *break water*, atau *beach fill* oleh alat-alat mekanik. Sedangkan pengertian erosi pantai ialah pemunduran garis pantai oleh kerja gelombang laut maupun arus laut melalui keempat prosesnya, yaitu: kerja hidraulik, korasi, pengausan partikel, dan pelarutan. Erosi pantai ini sering pula disebut sebagai rekresi pantai yakni insutatan garis pantai ke arah darat secara terus menerus.

Sementara itu, Sutikno (1993) menyebutkan bahwa aktivitas manusia di pantai dapat mengakibatkan aktifnya proses destruksional (proses yang cenderung merubah/merusak bentuk lahan yang ada sebelumnya) maupun konstruksional (proses yang membentuk bentuk lahan baru). Aktivitas manusia di pantai dapat mengganggu lingkungan pantai (gangguan yang disengaja atau tidak disengaja). Gangguan yang disengaja bersifat protektif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai, misalnya dengan membangun jetti, *groin*, pemecah gelombang atau penimbunan pantai. Aktivitas manusia yang tidak disengaja menimbulkan gangguan negatif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai misalnya pembukaan estuari untuk pelabuhan, pemotongan gosong penghalang untuk kelancaran lalu lintas air atau pembabatan/penambahan hutan mangrove (bakau) untuk dialihkan fungsinya sebagai tambak, kegiatan pariwisata atau untuk aktivitas lainnya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Pantai Ujong Blang Lhokseumawe Aceh yang meliputi tiga desa, yaitu Desa Ujong Blang, Desa Ulee Jalan, dan Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, mulai September 2000 s/d Desember 2001. Pengambilan lokasi penelitian yang dijadikan sampel adalah secara *purposive sampling*, yaitu pada tiga titik amatan, dimana untuk masing-masing

desa diambil 1 (satu) titik amatan. Di samping itu dilakukan observasi lapangan dan teknik komparasi data. Observasi dilakukan untuk mengamati terjadinya perubahan bentuk penggunaan lahan pantai, pola dan bentuk garis pantai, kondisi sosial budaya, kondisi sosial ekonomi, aktivitas penduduk dan aktivitas pariwisata pantai.

Komparasi data dilakukan melalui data penggunaan lahan tahun 1990 dan tahun 2000. Teknik ini digunakan untuk menentukan perbandingan persentase terjadinya perubahan luas dan bentuk penggunaan lahan pantai serta kondisi garis pantai. Di samping itu dilakukan wawancara dengan pimpinan desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Hasil pengecekan lapangan tentang perubahan bentuk penggunaan lahan pantai dan sekitarnya akan dicatat berdasarkan kondisi lapangan dan informasi dari pejabat setempat (informan). Selanjutnya perubahan garis pantai dan penggunaan lahan sempadan pantai dianalisis dengan teknik overlay peta (metode tumpang tindih dua buah peta atau lebih) penggunaan lahan tahun 1990 dan peta penggunaan lahan tahun 2000 dan

kemudian disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk diinterpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemanfaatan Lahan Sempadan Pantai

Sejak pengembangan pariwisata pantai Ujong Blang Lhokseumawe, perubahan penggunaan lahan di kawasan pantai Ujong Blang Lhokseumawe khususnya di area sempadan pantai yang berfungsi sebagai kawasan lindung setempat sangat menonjol, seperti terlihat pada Tabel 1.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun terakhir (periode 1990-2001) di kawasan wisata pantai Ujong Blang Lhokseumawe, khususnya pada area sempadan pantai telah mengalami perubahan bentuk penggunaan lahan yang cukup pesat. Lahan sempadan pantai seluas 267.100 meter persegi yang berfungsi sebagai kawasan lindung, dimana sebelum pengembangan pariwisata (sebelum tahun 1990) yang penggunaan lahannya didominasi hutan bakau dan gisik/pasiran pantai (57,54 persen). Hutan bakau seluas 90.600 m<sup>2</sup> atau sebesar 33,92 persen dari total luas sempadan pantai, dan terdapat

Tabel 1. Luas dan Jenis Penggunaan Lahan Sempadan Pantai Kawasan Pantai Ujong Blang Lhokseumawe

No	Jenis Penggunaan Lahan Sempadan Pantai	Sebelum tahun 1990		Sebelum Tahun 2001	
		Luas (m <sup>2</sup> )	%	Luas (m <sup>2</sup> )	%
1	Hutan bakau alami	90.600	33,92	8.200	3,07
2	Gisik/pasiran pantai	63.091	23,62	14.800	5,54
3	Pemakaman/Kuburan Umum	1.250	0,47	1.250	0,47
4	Fasilitas umum (Rumah Sekolah dan Rumah Ibadah/Mushalla)	1.600	0,60	6.000	2,25
5	Perumahan penduduk	8.700	3,26	48.510	18,16
6	Akomodasi pariwisata				
	- Bangunan hotel/cottage	-	-	6.000	2,25
	- Penginapan/losmen	600	0,22	1.800	0,67
7	Warung cenderamata	-	-	400	0,15
8	Rumah makan/Restoran	1.200	0,45	12.000	4,49
9	Warung rujak Aceh	15.497	5,80	86.400	32,35
10	Arena bermain anak (buatan)	-	-	10.000	3,74
11	Kolam ikan wisatawan (buatan)	-	-	1.800	0,67
12	Arena rekreasi	34.162	12,79	64.290	24,07
13	Aktivitas nelayan	50.400	18,87	4.850	1,82
14	Rumah musik/karouke	-	-	800	0,30
	Jumlah	267.100	100	267.100	100

gisik/pasiran pantai alami (belum ada penutup lahan buatan) seluas 63.091 m<sup>2</sup> atau sebesar 23,62 persen.

Sementara itu, saat ini penggunaan lahan sempadan pantai telah mengalami perubahan fungsi. Di mana sebahagian besar digunakan untuk pembangunan warung-warung rujak Aceh, yakni sebesar 32,35 persen dari total luas sempadan pantai. Sedangkan hutan bakau dan gisik/pasiran pantai alami, masing-masing hanya tinggal 3,07 persen dan 5,54 persen. Sehingga sempadan pantai yang berfungsi sebagai kawasan lindung setempat berubah fungsi menjadi kawasan pembangunan aktivitas ekonomi (aktivitas pariwisata).

#### **Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Pantai Terhadap Pemunduran Garis Pantai**

Pengembangan kepariwisataan pantai Ujong Blang Lhokseumawe, diikuti pula peningkatan pengadaan fasilitas/sarana penunjang pariwisata. Pembangunan fasilitas dan sarana tersebut dibangun di atas sempadan pantai bahkan sampai pada daerah pasang surut. Dengan demikian lahan sempadan pantai, yang sebelumnya didominasi oleh hutan bakau dan tumbuhan pantai lainnya diganti dengan pembangunan sarana penunjang pariwisata. Akibat dari semua itu, maka pengembangan kepariwisataan pantai Ujong Blang Lhokseumawe memberi dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat (Ishaq Rizal, 2000). Akan tetapi justru memberi dampak negatif yang signifikan terhadap perubahan fisik pantai terutama pemunduran garis pantai (pengurangan area/lahan sempadan pantai). Dengan demikian perubahan penggunaan lahan sempadan pantai alami yang berfungsi sebagai kawasan lindung setempat menjadi lahan aktivitas perekonomian (aktivitas pariwisata). Perubahan garis pantai dalam sepuluh tahun terakhir pada kawasan wisata pantai Ujong Blang Lhokseumawe adalah terjadi pemunduran garis pantai ke arah

darat secara proporsional rata-rata 160 meter.

Di samping itu pengamatan di kawasan wisata pantai Ujong Blang Lhokseumawe banyak terdapat pembangunan fisik dilakukan tanpa mengindahkan norma bangun membangun yang umum dipatuhi serta tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Sementara itu pembangunan rumah makan, restoran maupun hotel/cottage dan warung rujak Aceh, berada dalam kawasan sempadan pantai dan bahkan berada di daerah pasang surut. Salah satu dampak yang dialami oleh penduduk di sekitar kawasan pantai Ujong Blang akibat perubahan fungsi lahan sempadan pantai adalah serangan ombak dan badai bahkan masuknya air laut ke permukiman penduduk yang berjarak 500 meter dari pantai. Dua periode pasang purnama, Oktober 1999 dan Oktober 2000 merupakan dampak negatif yang paling parah dialami oleh masyarakat sekitar. Pada dua periode pasang purnama tersebut, rumah penduduk, fasilitas umum (mushalla, gedung sekolah, jalan desa), sarana pariwisata mengalami rusak parah, dan tidak bisa digunakan lagi.

Pengembangan kepariwisataan pantai Ujong Blang Lhokseumawe bukan satu-satunya penyebab timbulnya dampak negatif yang dialami oleh penduduk sekitar kawasan tersebut, bahkan faktor-faktor alam, seperti perubahan musim (pasang purnama, angin dan badai) juga ikut memberi pengaruh terhadap dampak negatif yang terjadi di sekitar kawasan wisata pantai. Sementara itu perubahan penggunaan lahan sempadan pantai, dari fungsi sebagai kawasan lindung setempat menjadi aktivitas ekonomi (aktivitas pariwisata) adalah faktor yang sangat kuat memberi dampak terhadap pemunduran garis pantai dan pengurangan

area (lahan) sempadan pantai sekitar kawasan wisata.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu:

Pengembangan kepariwisataan pantai Ujong Blang Lhokseumawe terlalu mengedepankan pendekatan ekonomi, sehingga membawa dampak negatif terhadap perubahan garis pantai dan penggunaan lahan sempadan pantai.

Perubahan fungsi penggunaan lahan sempadan pantai tersebut merupakan faktor yang sangat kuat untuk mempercepat proses erosi (abrasi) pantai. Dengan kata lain akibat perubahan fungsi lahan sempadan pantai tersebut terjadi pemunduran garis pantai, yaitu pengurangan daerah darat/area sempadan pantai.

Telah terjadi pemunduran garis pantai ke arah darat selama kurun waktu 10 tahun terakhir secara proporsional di sepanjang kawasan wisata pantai Ujong Blang Lhokseumawe adalah  $\pm 160$  meter.

Selain pemunduran garis pantai, perlindungan bahaya gelombang laut dan badai terhadap permukiman penduduk semakin berkurang, hal ini terbukti bahwa sejak dua tahun terakhir (Oktober 1999 dan Oktober 2000), perumahan/permukiman penduduk dan bangunan-bangunan lainnya yang berada di sekitar pantai mengalami rusak parah akibat pasang purnama, gelombang laut dan badai.

### SARAN

Kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan pihak terkait untuk secepat mungkin membangun tanggul pantai dan pemecah gelombang. Selain pembangunan tanggul juga perlu dilakukan penanaman kembali vegetasi pantai. Di samping itu senantiasa melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan daerah/wilayah.

Untuk menjamin pengembangan pariwisata pantai Ujong Blang menjadi pembangunan yang berkelanjutan, hendaknya melakukan penataan kembali zonasi tata ruang pantai Ujong Blang Lhokseumawe. Setiap pengembangan dan perencanaan untuk pembangunan di kawasan pantai Ujong Blang harus berpedoman pada pembagian daerah pantai yang benar (kawasan preservasi; kawasan konservasi, dan; kawasan pembangunan). Di samping itu senantiasa mengedepankan pendekatan sosial, budaya, dan pendekatan ekologis pada setiap pengambilan kebijakan/keputusan.

### REFERENSI

- Anonimous. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Anonimous,. 1990. Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Anonimous. 1997. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Anonimous. 1998. Surat Keputusan Bupati Aceh Utara nomor 0001 tahun 1998 tentang Penetapan Objek Wisata Daeah. Sekdakab Aceh Utara. Lhokseumawe.
- Anonimous. 1998. Surat Keputusan Bupati Aceh Utara nomor 556/035/1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Objek Wisata Daerah. Sekdakab Aceh Utara. Lhokseumawe.
- Dahuri, R. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sunarto, 1992. Teknik Sederhana Untuk Mendeteksi Akresi dan Erosi Pantai Sebagai Penunjang Perencanaan Tata Lingkungan Pesisir.. PPLH-UGM. Yogyakarta
- Sutikno, 1993. Karakteristik Bentuk dan Geologi Pantai. Dirjen Pengairan. Yogyakarta.
- Suwandi M. 2001. "Pemberdayaan Potensi Kelautan bagi Pembangunan Pariwisata di Indonesia". Majalah NEED. No 2 (2-3), Vol. 3, April 2001. Jakarta.